

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan dasar yuridis pembentukan jalur khusus bagi pengendara sepeda listrik di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepeda listrik dengan daya motor ≤ 250 watt dan kecepatan maksimal 25 km/jam dikategorikan sebagai kendaraan tertentu yang wajib menggunakan jalur khusus sebagaimana diamanatkan dalam Permenhub No. 45 Tahun 2020. Namun, implementasi aturan ini belum berjalan efektif di Kabupaten Jember karena belum adanya peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah yang menetapkan keberadaan jalur khusus tersebut. Ketiadaan regulasi lokal menciptakan kekosongan hukum dan potensi pelanggaran hak atas keselamatan lalu lintas. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menindaklanjuti regulasi nasional melalui penerbitan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati guna memastikan penyediaan jalur khusus sepeda listrik yang aman, tertib, dan sesuai dengan asas negara hukum. Penyusunan kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan hukum dan sosial di tengah tren penggunaan kendaraan listrik yang terus berkembang.

Kata kunci: Jalur Khusus, Pemerintah Daerah, Permenhub No. 45 Tahun 2020, Sepeda Listrik.



ABSTRACT

This study aims to analyse the urgency and legal basis for establishing a dedicated lane for electric bicycle riders in Jember Regency based on Minister of Transportation Regulation No. 45 of 2020 concerning Certain Vehicles with Electric Motor Propulsion. The research method used is normative legal analysis with a legislative approach and a conceptual approach. The research findings indicate that electric bicycles with motor power ≤ 250 watts and a maximum speed of 25 km/h are classified as specific vehicles that are required to use dedicated lanes, as mandated by Minister of Transportation Regulation No. 45 of 2020. However, the implementation of this regulation has not been effective in Jember Regency due to the absence of local regulations or policies from the local government establishing the existence of such dedicated lanes. The absence of local regulations creates a legal vacuum and the potential for violations of the right to traffic safety. The conclusion of this study underscores the importance of local governments in enforcing national regulations through the issuance of Local Regulations or Regent Regulations to ensure the provision of safe, orderly, and legally compliant dedicated lanes for electric bicycles. The formulation of such policies represents a strategic step in addressing legal and social needs amid the growing trend of electric vehicle usage.

Keywords: Special Lanes, Local Government, Ministry of Transportation Regulation No. 45 of 2020, Electric Bicycles

